

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan adalah kegiatan berupa tindakan administratif yang berkaitan dengan kegiatan mulai dari proses perencanaan anggaran, penyimpanan, penggunaan, pencatatan dan pengawasan keluar masuknya uang atau dana instansi (Mardiasmo, 2004). Selain itu, pengelolaan keuangan juga dapat menentukan kelancaran instansi terkait dalam mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Hal ini merupakan kewajiban bagi instansi baik di pemerintah pusat maupun daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan Negara.

Berdasarkan website resmi *bpk.go.id* ditegaskan bahwa dalam setiap aktivitas dan sub institusi negara bertujuan untuk mewujudkan keuangan negara yang bertanggung jawab. Untuk itu pemerintah atau institusi tersebut harus bersifat akuntabel dan transparan dalam mengelola laporan keuangan kepada publik dan masyarakat. Pengelolaan keuangan negara ini telah diatur berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang berbunyi: *“Seluruh hak dan kewajiban Negara dapat dinilai dengan uang maupun dapat berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”*. Berdasarkan

UU tersebut diharapkan tujuan pemerintah untuk dapat mengelola keuangan dengan baik dan lancar dapat terwujud.

Laporan keuangan merupakan salah satu aspek paling penting selama keberlangsungan instansi dalam proses pengelolaan keuangan negara. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015), pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No.1, bahwa laporan keuangan adalah bagian proses dari pelaporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini merupakan sebuah penyajian yang terstruktur dari kinerja keuangan serta posisi keuangan. Laporan keuangan ini memuat laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Bentuk dan isi laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk memahami informasi laporan keuangan, maka diperlukan adanya analisis laporan keuangan.

Menurut Harahap (2015) yang menyatakan bahwa analisis laporan keuangan didalam nya terdapat laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan neraca, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi, analisis laporan keuangan yaitu sebuah uraian data ataupun informasi yang ada pada laporan keuangan tersebut menelaah tiap komponen serta memahami hubungan komponen itu dengan menggunakan analisis agar mendapatkan pemahaman masalah informasi tersebut. Hal ini juga dapat dilakukan terhadap angka-angka dari laporan keuangan salah satunya yaitu neraca.

Menurut Munawir (2002), neraca merupakan sebuah laporan yang memberitahukan semua sumber ekonomi pada perusahaan, kewajiban ataupun hak milik perusahaan pada waktu tertentu untuk memasukan modalnya. Oleh

sebab itu, neraca disusun dengan sistemis agar mencerminkan sebuah gambaran posisi keuangan perusahaan.

Penilaian laporan keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur kinerja keuangan suatu entitas dengan menggunakan analisis rasio-rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis (Mahmudi, 2019).

Rasio keuangan disini menjelaskan hubungan antara dua macam data keuangan sehingga menghasilkan persentase yang kemudian dibandingkan dengan ketentuan yang sudah ada. Dari hasil perbandingan tersebut barulah dapat dianalisis sehingga dapat diketahui bagaimana kinerja dari lembaga pemerintahan itu sendiri, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau sebaliknya.

Untuk menganalisis laporan keuangan tersebut, penulis menggunakan analisis rasio keuangan yang dilakukan dengan mengambil data laporan keuangan selama dua periode belakangan. Dua tahun terakhir merupakan periode yang terbaru sehingga penting untuk dilakukan perbandingan analisis keuangan untuk mengetahui apakah adanya kenaikan atau penurunan yang terjadi dari periode sebelumnya dengan membandingkan terhadap periode terbaru dari laporan keuangan tersebut. Hasil dari melakukan analisis laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan

dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuat perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan, pengambilan keputusan serta dapat dijadikan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan kinerja instansi yang bersangkutan.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/OTL.0/1/2016 tanggal 26 Januari 2016. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat merupakan instansi pemerintah pusat yang berkedudukan di daerah provinsi. Instansi ini mempunyai tugas yaitu menangani urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan, meliputi urusan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah-limbah beracun. Diluar tugas Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BKSDA diatas, juga memiliki pengaruh dalam urusan administrasi, serta kebijakan dalam pengelolaan keuangan.

Sebagai salah satu instansi yang diserahi tugas dalam menjalankan urusan pemerintahan, BKSDA mendapat bantuan dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Oleh sebab itu, BKSDA harus memiliki kreatifitas dan juga inisiatif dalam mengelola sumber daya keuangannya sehingga pada akhirnya dapat mencerminkan kinerja

suatu lembaga yang baik. Dengan demikian BKSDA Sumatera Barat bisa menjadi Instansi yang menciptakan layanan yang transparan dan akuntabilitas melalui kinerja laporan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan alasan tersebut, maka diperlukan analisis kinerja keuangan BKSDA Sumatera Barat pada dua periode belakangan, sehingga dari hasil analisis tersebut dapat dinilai kemampuan BKSDA Sumatera Barat apakah sudah berhasil atau belum dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk memilih judul: **“ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (BALAI KSDA SUMATERA BARAT) BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN PADA TAHUN 2022-2023”**

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian di atas, rumusan masalah yang akan dibahas yakni bagaimanakah perbandingan kinerja laporan keuangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat berdasarkan perhitungan analisa rasio keuangan pada periode dua tahun terakhir (2022-2023).

1.3 Tujuan Kegiatan Magang

Tujuan dari kegiatan magang ini adalah untuk mengetahui kinerja laporan keuangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat berdasarkan analisa rasio terhadap perbandingan laporan keuangan pada tahun 2022-2023.

1.4 Manfaat Kegiatan Magang

Adapun manfaat dari kegiatan magang yang diambil penulis adalah sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Mahasiswa

- a. Memberikan edukasi terkait pembahasan magang tentang laporan keuangan.
- b. Mendapatkan pengalaman untuk menghadapi dunia kerja.
- c. Membentuk karakter yang siap dan bertanggung jawab dalam menghadapi dunia kerja.
- d. Mempraktikan hal yang dipelajari selama perkuliahan kedalam praktek kerja yang sesungguhnya.

1.4.2 Bagi Instansi

Diharapkan dapat menjadi saran atau sebagai pertimbangan dalam usaha evaluasi penyempurnaan atas Analisis perbandingan kinerja laporan keuangan BKSDA berdasarkan laporan keuangan tahun 2022-2023.

1.4.3 Bagi Akademik

- a. Menjalinkan kerja sama yang baik Universitas Andalas dengan instansi tersebut.
- b. Membentuk lulusan yang berkualitas dan siap terjun dalam dunia kerja.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini dilakukan di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai KSDA Sumatera Barat) yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman

No.53, Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25173, dilakukan selama jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 40 hari kerja yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2024.

1.6 Metode Pengumpulan Data

1.6.1 Data dan Sumber Data

Dalam penulisan ini penulisan banyak menggunakan metode atau pendekatan melalui riset langsung pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai KSDA Sumatera Barat).

Data dan sumbernya berasal dari laporan keuangan tahunan BKSDA. Laporan keuangan BKSDA tersebut nanti bisa diperoleh dengan meminta atau bertanya kepada orang di BKSDA yang bekerja di bidang keuangan atau ke bendahara umum BKSDA SUMBAR. Data yang dibutuhkan yaitu Neraca.

1.6.2 Cara Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Studi Lapangan ini dilaksanakan dengan cara meninjau secara langsung ke lapangan atau instansi tersebut, untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan serta memahami tujuan penulisan, lalu dilakukanlah pelaksanaan kegiatan magang di BKSDA.

b. Studi Pustaka

Studi dilakukan untuk memperoleh landasan-landasan teori dari buku-buku, majalah dan publikasi berupa bahan bahan kuliah dan artikel yang berhubungan dengan masalah yang ada.

1.7 Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan, dan batasan masalah, tujuan dan manfaat kegiatan magang, tempat dan waktu magang, rencana kegiatan, metode analisa dan sistematika penyusunan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang bersangkutan dalam permasalahan yang akan diuraikan oleh penulis untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab gambaran umum ini, penulis akan menjelaskan suatu hal yang bersangkutan dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai KSDA Sumatera Barat), yang isinya adalah uraian awal terbentuknya BKSDA, penyusunan struktur organisasi serta hal yang berkaitan dengan penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab pembahasan ini akan menganalisis laporan dari perolehan kegiatan pelaksanaan magang terkait tentang Mekanisme program transaksi keuangan di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai KSDA Sumatera Barat).

BAB V PENUTUPAN

Pada Bab ini merupakan penutupan yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pelaksanaan magang serta saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai KSDA Sumatera Barat).